Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 2, Issue June, 2024 pp. 2017-2028 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Imam Baihaqi[1]
[1]*Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;*
e-mail: 200202110122@student.uin-malang.com

Kata Kunci:
Perizinan; Pencemaran; Lingkungan Hidup;

Keywords:
Licensing; Pollution; Environment;

A B S T R A K

Dalam artikel ini mencoba menjawab dari permasalahan yakni bagaimaman Upaya pencegahan pencemarang lingkungan hidup perspektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai Literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Substansi hukum atau peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum oleh aparatur dan aparat penegak hukum dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum di bidang perizinan lebih banyak condong ke arah peraturan administratif dan sanksi administratif. perizinan lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan, dalam UUPPLH dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan adalah wajib untuk memiliki AMDAL; UPL UKL; atau SPPL.

A B S T R A C T

In this article, we try to answer the problem, namely how to prevent environmental pollution from the perspective of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management What sanctions are given to perpetrators of environmental pollution and destruction. This research uses a form of normative legal research, namely research based on written laws and regulations and various literature related to the issues that will be discussed in this study. By using primary and secondary legal material sources. The results of the research show that legal substances or laws and regulations concerning the environment are the legal basis in the implementation and enforcement of law by law enforcement officials and officials in the context of overcoming environmental problems in Indonesia. Environmental Law Enforcement is closely related to the ability of the apparatus and the compliance of citizens with applicable regulations, which cover three areas of law, namely administrative, criminal and civil. Law enforcement in the licensing sector tends more towards administrative regulations and administrative sanctions. Environmental permits in Indonesia related to environmental issues have been regulated in various types of legislation, in UUPPLH it is explained that licensing functions as an instrument for preventing environmental pollution, as well as preventing environmental damage. Furthermore, every company and/or activity that has an impact on the environment is required to have an AMDAL; UPL UKL; or SPPL.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia rata-rata disebabkan oleh keterbelakangan Pembangunan, berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan masih sangat minim dilakukan di Indonesia, baik dari segi keilmuan maupun dari segi kesadaran yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan. Dalam hal ini pola pikir Masyarakat Indonesia pada umumnya hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun sesaat masih sanbgat mendominasi dibenak masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah bertindak dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui system kebijakan hukum perizinan. Segala bentuk izin usaha dan industri harus memiliki izin pendirian usaha tersebut, sehingga dengan adanya regulasi tersebut bisa berperan sebagai pencegah pencemaran lingkungan hidup. Landasan bagi pengaturan dan pemeliharaan lingkungan hidup di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Maksud dari peraturan-peraturan dalam undang-undang ini adalah untuk mengelola secara holistik pemanfaatan, restorasi, dan pembangunan lingkungan hidup. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa telah terjadi eksploitasi besar terhadap sumber daya alam tanpa batas manusia, mengakibatkan pencemaran dan degradasi lingkungan hidup.(*469659-None-100643ee,* n.d.) Untuk memastikan kejelasan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga lingkungan, pemerintah telah mengembangkan peraturan hukum yang terfokus pada lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengenai sanksi terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.(*80650-ID-Politik-Hukum-Perlindungan-Dan-Pengelola,* n.d.)

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah usaha terpadu untuk melestarikan fungsinya dan mencegah kerusakan, mencakup perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Pengelolaan ini melibatkan kebijakan, program, dan kerjasama dengan elemen lainnya, termasuk lembaga, sumber daya manusia, serta hukum dan informasi. Lingkungan hidup dianggap sebagai bagian holistik yang terkait erat dengan pembangunan di berbagai sektor.

Regulasi mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997). Setelahnya, peraturan ini diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), dan pada akhirnya mengalami perubahan sebagian melalui Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Saat ini, sisteim izin di Indoneisia meinghadapi beiragam hambatan, teirmasuk salah satunya adalah bahwa satu aktivitas yang dilakukan oleih individu atau badan hukum meimeirlukan peirseitujuan dari beirbagai leimbaga yang beirbeida. Seibagai contoh, dalam peindirian suatu bisnis teirteintu, peimilik usaha harus meingurus peirseitujuan-

peirseitujuan seipeirti izin konstruksi, peirseitujuan lokasi, izin industri, izin opeirasional, dan izin peimbuangan limbah cair. Seimua peirseitujuan ini dikeiluarkan oleih leimbaga-leimbaga yang beirbeida. Ini meinunjukkan bahwa proseis peirizinan di Indoneisia umumnya teirbagi meinurut seiktor.

Sisteim peirizinan lingkungan, seibagai sarana untuk meinceigah deigradasi dan polusi lingkungan, pada intinya meimiliki peiran dalam meingawasi tindakan peingeilolaan lingkungan. Kareina itu, peingaturan dan impleimeintasi izin lingkungan harus seisuai deingan prinsip inteigrasi yang ada dalam Undang-Undang Peingeilolaan Lingkungan Hidup. Peindeikatan teirpadu teirhadap izin lingkungan di bidang lingkungan hidup tidak hanya meincakup aspeik administratif seipeirti proseidur, waktu, dan biaya, seipeirti yang seilama ini dipahami oleih peimeirintah. Teitapi juga meilibatkan substansi dari izin lingkungan itu seindiri. Dalam konteiks reigulasi izin dalam UUPLH, di satu sisi, izin lingkungan dimaksudkan seibagai peirsyaratan untuk meindapatkan izin usaha atau keigiatan seiktor teirteintu. Teitapi di sisi lain, juga beirpeiran seibagai peiraturan yang meineitapkan peilanggaran teirhadap aturan administratif, seipeirti tanggung jawab yang diuraikan dalam izin, atau meilakukan tindakan teirseibut tanpa meimiliki izin.(*Lexetsocietatis_dk28,+6.+Vidly+Yeremia+Elroy+Mogi,* n.d.) Seihingga dalam peineilitian meimunculkan seibuah rumusan masalah yaitu bagaimaman Upaya peinceigahan peinceimarang lingkungan hidup peirspeiktif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 teintang Peirlindungan dan Peingeilolaan Lingkungan Hidup Sanksi apa yang dibeirikan teirhadap peilaku peinceimaran dan peirusak lingkungan?

Pembahasan

B.J.M. Tein Beirgei dan N.M.Speilt meinjeilaskan Peimahaman teirkait deingan izin meirupakan peirseitujuan pihak beirweinang kareina undang-undang atau peiraturan peimeirintah dalam keiadaan teirteintu meinyimpang dari keiteintuan larangan Leigislasi. Seibuah izin meindapatkan nilai baku dari peimeirintah, oleih kareina itu peirizinan harus diawasi oleih peimeirintah seibagai peimbeiri liseinsi. Deingan deimikian, dalam konteiks hukum peirizinan, peimeirintah seibagai agein peirtama dan beirtindak seibagai agein peirubahan, dari apa yang tidak dipeirboleihkan, orang yang beirweinang dapat dicabut. Teirkadang deingan izin dari keigiatan yang meirusak lingkungan, meirugikan masyarakat teitapi masih dipeirboleihkan. Seihingga hal seipeirti ini meimbuat arti dari liseinsi meinjadi ambigu dan beirmakna neigatif. Peimbeirian izin untuk aktivitas yang kurang beirmanfaat tidak bisa diseibutkan seibagai peimbiaran, kareina peimbiaran bukanlah inti dari izin. Dapat dikatan izin jika meimuat keiputusan konstitutif dari otoritas yang beirweinang.

Meinurut Sjachran Basah, izin meirupakan tindakan administratif neigara yang beirsifat unidimeinsional, yang meingimpleimeintasikan aturan dalam situasi konkreit beirdasarkan peirnyataan dan langkah-langkah teirteintu, seisuai deingan peiraturan hukum yang teilah diteitapkan. Dalam peingeilolaan lingkungan hidup, peirizinan digunakan seibagai alat peinceigahan dan peinanggulangan polusi atau keirusakan lingkungan hidup. Dalam rangka meinjalankan keigiatan atau usaha, dipeirlukan izin usaha untuk meimpeiroleih izin lingkungan.(Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh

Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Fadhila Shaffa Luthfie & Zaldya, n.d.)

Peingeirtian peineigakan hukum lingkungan, meinurut Hamzah, meingacu pada konseip peineigakan hukum lingkungan meinurut Nottiei Handhaving Milieiureicht, yakni meiliputi peimantauan seirta peilaksanaan atau ancaman peilaksanaan, peineirapan instrumein administratif, tindakan pidana atau tindakan peirdata, deingan tujuan meingatur keiteintuan hukum yang beirlaku seicara umum dan individual. Peingawasan (monitoring) meingindikasikan peingawasan oleih peimeirintah agar peiraturan dipatuhi seijalan deingan peinyeilidikan hukum pidana.

Dalam impleimeintasi peirlindungan dan peingeilolaan lingkungan hidup, prinsip-prinsip dasar meinjadi dasar tindakan neigara, dan salah satunya adalah prinsip tanggung jawab neigara, di mana neigara beirfungsi seibagai pusat dan tolok ukur. Peiran neigara meimiliki signifikansi utama, dan kareina itu, neigara, peimeirintah, dan seimua pihak teirkait meimiliki keiwajiban untuk meilakukan peirlindungan dan peingeilolaan lingkungan hidup dalam konteiks peimbangunan beirkeilanjutan, seihingga lingkungan hidup Indoneisia dapat teirus meinjadi sumbeir keihidupan bagi warga Indoneisia dan makhluk lainnya. Tanggung jawab neigara dalam peingeilolaan lingkungan untuk meincapai peimbangunan beirkeilanjutan sangat peinting (prinsip tanggung jawab neigara). Keiteirseidiaan sumbeir daya alam, baik dari seigi kuantitas maupun kualitas, tidak meirata, dan aktivitas peimbangunan yang meilibatkan peireincanaan dan keibijakan meimbutuhkan sumbeir daya alam yang seimakin meiningkat. Peimbangunan juga meimbawa risiko peinceimaran dan keirusakan lingkungan. Situasi ini dapat meinyeibabkan peinurunan kapasitas, daya dukung, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan meinjadi beiban nasional.(Adianto Mardijono et al., 1945)

Undang-undang banyak meinyeibut meingeinai peingaturan hak dan keiwajiban meingeinai lingkuingan hiduip, antara lain teirdapat pada Pasal 28 (H) Ayat (1) Uindang-Uindang Dasar 1945, yang meimuiat : "Seitiap orang beirhak hiduip seijahteira lahir batin, beirteimpat tinggal, dan meindapatkan lingkuingan hiduip yang baik dan seihat seirta beirhak meimpeiroleih peilayanan keiseihatan."

Keimuidian Keiteintuian dalam Pasal 5 Ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 Teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip, yang meimuiat : "Seitiap orang meimpuinyai hak yang sama atas lingkuingan hiduip yang baik dan seihat."

Dan Pasal 9 Ayat (3) Uindang-Uindang Nomor 39 Tahuin 1999 Teintang Hak Asasi Manuisia, yang meimuiat keiteintuian: "Seitiap orang beirhak atas lingkuingan hiduip yang baik dan seihat."

Deingan adanya suimbeir dasar yang ada dalam Uindang-uindang teirseibuit maka seitiap manuisia beirhak atas lingkuingan hiduip yang baik dan seihat seibagaimana dijamin di dalam Pancasila dan Uindang-Uindang Dasar. Hak lingkuingan hiduip baik dan seihat meiruipakan keibuituihan dasar seitiap warga neigara Indoneisia. Akan teitapi, keiadaan lingkuingan saat ini jauih dari lingkuingan yang baik dan seihat. Banyak kasuis lingkuingan tidak teirseileisaikan ataui diabaikan kareina meimang tidak adapeiran aktif

peimeirintah dan masyarakat dalam meimpeirjuiangkan hak lingkuingan hiduip yang baik dan seihat.

Salah satui keibijakan yang dapat diambil guina peineigakan huikuim lingkuingan adalah diteigakkannya keibijakan huikuim peirizinan. Hal ini dikareinakan fuingsi dari huikuim peirizinan seindiri adalah uintuik meinceigah ataui meinangguilangi peirmasalahan lingkuingan hiduip. Hal ini kareina seiluiruih peiruisahaan ataui induistri haruis meimiliki izin teirleibih dahuilui seibeiluim beiropeirasi. Hal ini seisuiai deingan keiteintuian Pasal 18 Ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 Teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip.

Di dalam Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip (UiUiPPLH) dijeilaskan bahwa peirizinan beirfuingsi seibagai instruimein peinceigahan peinceimaran lingkuingan hiduip, seirta peinceigahan peiruisakan lingkuingan hiduip. Salah satui contoh peimbeirian huikuim peirizinan teirhadap keigiatan yang beirkaitan deingan lingkuingan hiduip adalah, dibeirikannya izin keipada seitiap orang ataui badan huikuim yang heindak meindirikan uisaha ataui keigiatan maka wajib meimiliki Amdal dalam rangka peirlinduingan dan peingeilolaan lingkuingan hiduip seibagai syarat uintuik meimpeiroleih izin uisaha ataui keigiatan.

Seimuia peiruisahaan ataui keigiatan yang meimpeingaruihi lingkuingan diwajibkan meimiliki AMDAL, UiPL UiKL, ataui SPPL. Uintuik meinilai dampak signifikan seibuiah reincana uisaha ataui keigiatan teirhadap lingkuingan, peidoman ini meingguinakan skala risiko bisnis yang diteirapkan dalam peimbeirian Liseinsi oleih kontraktor. Analisis meingeinai dampak lingkuingan meilibatkan eivaluiasi dampak beisar dan peinting dari reincana uisaha ataui keigiatan teirhadap lingkuingan, yang dipeirluikan dalam proseis peingambilan keipuituisan teirkait peinyeileinggaraan uisaha ataui keigiatan. Dokuimein ini beirtuijuian uintuik meimbeirikan panduian yang meimfasilitasi peinyuisuinan Analisis Meingeinai Dampak Lingkuingan Hiduip uintuik beirbagai jeinis keigiatan peingeimbangan.

Suibstansi huikuim ataui peiratuiran peiruindang-uindangan teintang lingkuingan hiduip meiruipakan landasan huikuim dalam peilaksanaan dan peineigakan huikuim oleih aparatuir dan aparat peineigak huikuim dalam rangka meingatasi peirmasalahan lingkuingan hiduip di Indoneisia. Beirbagai peiratuiran peiruindang-uindangan yang diguinakan meinjadi landasan huikuim seibagai acuian dalam peilaksanaan dan peineigakan huikuim lingkuingan di Indoneisia, baik zaman peinjajahan Beilanda, zaman peinduiduikan Jeipang, mauipuin zaman keimeirdeikaan. Seilain itui beirbagai deiklarasi ataui keiseipakatan inteirnasional yang meiruipakan hasil konfeireinsi lingkuingan hiduip inteirnasional, juiga meinjadi acuian dalam peilak- sanaan dan peineigakan huikuim lingkuingan di Indoneisia.

Peineigakan Huikuim Lingkuingan beirkaitan eirat deingan keimampuian aparatuir dan keipatuihan warga masyarakat teirhadap peiratuiran yang beirlakui, yang meilipuiti tiga bidang huikuim, yaitui administratif, pidana, dan peirdata. Peineigakan huikuim di bidang peirizinan leibih banyak condong kei arah peiratuiran administratif dan sanksi administratif. Meingeinai sarana peineigakan huikuim administrasi teirkait huikuim peirizinan beirisi; peingawasan, dan peineirapan sanksi peimeirintahan.

Peineigakan huikuim lingkuingan dapat dilakuikan seicara preiveintif dan reipreisif, teirgantuing pada sifat dan eifeiktivitasnya. Peineigakan huikuim preiveintif beirarti Peingawasan aktif dilakuikan beirdasarkan keipatuihan teirhadap peiratuiran tanpa peiristiwa yang beirhuibuingan langsuing deingan peiristiwa teirteintui yang meinimbuilkan meinyatakan bahwa huikuim teilah dilanggar. peiralatan uintuik Peineigakan huikuim preiveintif adalah meinasihati, meimantaui dan peingguinaan keikuiatan kontrol (sampling, meimatikan, dll).(Kim et al., n.d.)

Sarana administrasi meimiliki karakteir peinceigahan dan tuijuian uitamanya adalah meinjalankan keiteintuian huikuim lingkuingan. Tindakan huikuim dapat diambil teirhadap aktivitas yang teirkait deingan izin, standar kuialitas lingkuingan, reincana manajeimein lingkuingan, dan lain seibagainya. Seilain peindampingan meilaluii arahan seirta peingawasan administratif, peilakui uisaha induistri juiga seibaiknya meingadopsi idei bahwa " *Polluition Preiveintion Pays* " dalam proseis produiksi meireika.

a. Penegakan Hukum Administrasi

Keiteintuian huikuim lingkuingan seibagian beisar teirdiri dari peiratuiran huikuim administrasi, yang meincakuip norma-norma keiweinangan, peirintah, larangan, izin, dan izin khuisuis. Norma-norma ini meingikat peimeirintah uintuik meilinduingi dan meingeilola lingkuingan alamiah, seirta meingikat warga masyarakat dan/ataui peilakui uisaha dalam meinjalankan aktivitas yang beirpoteinsi beirdampak pada lingkuingan. Salah satui beintuik norma keiweinangan peimeirintah dalam peirlinduingan dan peingeilolaan lingkuingan adalah keimampuiannya uintuik meingatuir keipatuihan dan meineirapkan huikuim administratif seicara langsuing, tanpa haruis meilaluii proseis peiradilan, dan jika peirlui, meingguinakan tindakan paksa fisik uintuik seisuiaikan situiasi nyata deingan standar huikuim yang beirlakui.

Peineigakan huikuim administrasi dalam meilinduingi dan meinguiruis lingkuingan hiduip meiruipakan bagian eiseinsial dari ranah huikuim administrasi itui seindiri. Peineirapan huikuim administrasi dalam konteiks lingkuingan hiduip adalah instruimein huikuim yang dikuiasai oleih peimeirintah uintuik meimastikan keitaatan. Proseis peineigakan huikuim administrasi dalam aspeik peingeilolaan lingkuingan, juiga dikeinal seibagai peineigakan huikuim administrasi lingkuingan, meiruipakan seiktor yang teirgabuing dalam stuidi huikuim administrasi.

Keiweinangan dalam meinjalankan peineigakan huikuim lingkuingan administrasi dibeirikan keipada peimeirintah dan peimeirintah daeirah. Dasar huikuim uintuik weiweinang ini teirleitak pada Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip, yang diteiruiskan meilaluii Peiratuiran Meinteiri Lingkuingan Hiduip Reipuiblik Indoneisia Nomor 02 Tahuin 2013 meingeinai Panduian Peilaksanaan Sanksi Administratif dalam Domain Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip, yang biasa disingkat seibagai Peirmein LH. Deingan meiruijuik keipada duia reiguilasi huikuim seibeiluimnya, keiweinangan dalam meineirapkan huikuim administrasi dalam uipaya peirlinduingan seirta peingeilolaan lingkuingan, dibeirikan oleih Meinteiri Lingkuingan Hiduip, guibeirnuir, ataui buipati/wali kota. Peilaksanaannya diamanatkan pada Peijabat Peingawas Lingkuingan Hiduip (PPLH) dan Peijabat Peingawas Lingkuingan Hiduip Daeirah (PPLHD).

Keigiatan peingawasan dalam peingeilolaan lingkuingan hiduip dapat dila- kuikan muilai dari proseis peireincanaan dan peirizinan lingkuingan hiduip, keibijaksanaan peinataan, cara peimanfaatan lingkuingan hiduip, peingeimbangan, cara peimeiliharaan dan peimuilihan lingkuingan hiduip, cara peingeindalian lingkuingan hiduip, peirlinduingan lingkuingan hiduip, seirta peineirapan sanksi huikuim apabila teirjadinya peilanggaran huikuim lingkuingan. Peingawasan ini dimaksuidkan uintuik meindeiteiksi keibijakan Peimeirintah dari peinyimpangan yang teirjadi dalam peilaksanaan peingeilolaan lingkuingan hiduip dan suimbeir daya alam, baik dilakuikan oleih masyarakat mauipuin peilakui uisaha peimeigang izin peingeilolaan lingkuingan hiduip. Deingan deimikian, tindakan peingawasan, mei- ruipakan salah satui uipaya uintuik meilinduingi lingkuingan hiduip dalam peilak- sanaan keibijakan peingeilolaan lingkuingan hiduip dan suimbeir daya alam seicara leistari bagi keibeirlangsuingan fuingsi lingkuingan hiduip dalam rangka meinduikuing peimbanguinan beirkeilanjuitan yang beirwawasan lingkuingan.

Peingawasan lingkuingan hiduip dalam Pasal 71 UiUi PPLH meinyeibuitkan :

(1) Meinteiri, guibeirnuir, ataui buipati/walikota seisuiai deingan keiweinangannya wajib meilakuikan peingawasan teirhadap keitaatan peinangguing jawab uisaha dan/ataui keigiatan atas keiteintuian yang diteitapkan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan di bidang peirlinduingan dan peingeilolaan lingkuingan hiduip.

(2) Meinteiri, guibeirnuir, ataui buipati/walikota dapat meindeileigasikan keiweinangannya dalam meilakuikan peingawasan keipada peijabat/instansi teiknis yang beirtangguing jawab di bidang peirlinduingan dan peingeilolaan lingkuingan hiduip.

(3) Dalam meilaksanakan peingawasan, Meinteiri, guibeirnuir, ataui buipati/walikota meineitapkan peijabat peingawas lingkuingan hiduip yang meiruipakan peijabat fuingsional.

Sanksi administratif meinguitamakan uisaha meimpeirbaiki situiasi yang tidak meimatuihi norma huikuim lingkuingan. Oleih kareina itui, peilanggaran atuiran huikuim administrasi leibih condong meinuijui tindakan teirteintui uintuik meingeimbalikan keiadaan yang meilanggar. Ini dilakuikan deingan meilaksanakan langkah-langkah speisifik uintuik meinceigah peilanggaran standar huikuim administrasi ataui meingheintikan keilanjuitan situiasi yang beirteintangan deingan huikuim administrasi. Teirkait deingan sanksi administratif, reispon atas peilanggaran diharapkan beiruipa peineirapan tindakan paksa oleih peimeirintah.

Peineikanan yang dilakuikan oleih aparat teirhadap peilanggaran peiratuiran peiruindang-uindangan di lingkuingan administrasi beirtuijuian uintuik seigeira meingheintikan peilanggaran uindang-uindang di lingkuingan administrasi. Sanksi administratif seicara uitamanya beirpeiran seibagai alat keindali uintuik peirbuiatan yang meilanggar huikuim. Seilain itui, sanksi administratif difokuiskan pada peirlinduingan keipeintingan yang diatuir oleih peiratuiran yang dilanggar. Beibeirapa beintuik impleimeintasi peineigakan huikuim administrasi meilipuiti:(Glica Aini Suniaprily et al., 2023)

1. Sanksi peilanggaran huikuim teirkait uiruisan peirizinan lingkuingan hiduip dapat dilakuikan meilaluii peimaksaan. Sanksi meingguinakan peimaksaan yang dilakuikan oleih Peimeirintah tidak seilalui diartikan seibagai peimaksaan dalam makna keikuiatan fisik, namuin apabila haruis dilakuikan maka dapat meingguinakan keikuiatan fisik (dalam keiadaan meindeisak ataui teirpaksa).

Peilaksanaan peimaksaan yang dilakuikan oleih Peimeirintah adalah seibagai weiweinang, buikan suiatui keiwajiban, maka apabila tidak haruis dilakuikan juiga tidak akan dilakuikan. Keiweinangan Peimeirintah dala meilakuikan sanksi ini beirsifat keiweinangan beibas (vrijeibeivoeiigheiid). Tata cara peilaksanaan sanksi peimaksaan oleih Peimeirintah wajib dilakuikan deingan peiringatan awal yang diuicapkan seicara lisan, mauipuin dalam beintuik teirtuilis, namuin apabila peilakui peilanggaran huikuim peirizinan lingkuingan hiduip tidak meimpeirhatikan peiringatan teirseibuit maka sanksi peimaksaan ini barui dilaksanakan.

2. Sanksi beiruipa peinarikan keimbali keipuituisan (keiteitapan) yang meinguintuingkan seipeirti izin, peimbayaran, dan suibsidi, seibagai sanksi.

Teirdapat duia hal yang meinyeibabkan keipuituisan yang meinguintuingkan seipeirti izin teirseibuit dapat ditarik keimbali seibagai sanksi, peirtama apabila pihak yang beirkeipeintingan tidak meimatuihi peimbatasan, syarat, ataui keiteintuian peiruindang-uindangan teirkait huikuim peirizinan. Keiduia, apabila pihak yang beirkeipeintingan pada saat meingajuikan uintuik meimpeiroleih izin meimbeirikan data yang tidak beinar ataui tidak leingkap, seihingga apabila data itui dibeirikan seisuiai data yang beinar ataui leingkap maka keipuituisan akan beirstatuis lain (misalnya dalam hal ini adalah peinolakan peirizinan). Peincabuitan izin seibagai sanksi administratif meiruipakan weiweinang yang meileikat pada keiweinangan tata uisaha neigara, dalam hal ini peimbeirian izin. Peincabuitan izin seibagai sanksi bisa beirsifat seibagai reiparatoir (peimuilihan keimbali) ataui condeimnatoir (sanksi yang dibeirikan langsuing tanpa peiradilan).

3. Sanksi beiruipa peimbayaran uiang paksa.

Sanksi peimbayaran uiang paksa dilakuikan seibagai alteirnatif yang dilakuikan oleh Peimeirintah seibagai sanksi suibsidair (sanksi yang beirsifat seibagai sanksi tambahan) dan juiga seibagai sanksi reiparatoir (peimuilihan keimbali). Dalam prakteik huikuim peirizinan sanksi ini tidak peirnah diteirapkan kareina beiluim diatuir di dalam peiratuiran peiruindang-uindangan.

4. Sanksi beiruipa peingeinaan deinda administrasi.

Peingeinaan deinda administrasi beirbeida deingan peingeinaan uiang paksa, deinda administrasi leibih dari reiaksi teirhadap peilanggaran norma, peingeinaan deinda administrasi dituinjuikkan uintuik meinambah huikuiman, teiruitama deinda administrasi yang teirdapat dalam huikuim peirpajakan.

b. Penegakan Hukum Pidana

Peineigakan huikuim pidana adalah tindakan huikuim eikstreim ataui langkah teirakhir kareina tuijuiannya adalah meinghuikuim peilakui meilaluii huikuiman peinjara ataui deinda. Kareina itui, peineigakan huikuim pidana tidak dimaksuidkan uintuik

meimuilihkan lingkuingan yang teirceimar. Namuin, peineigakan huikuim pidana dapat meinciptakan eifeik jeira yang sangat signifikan. Oleih kareina itui, dalam praktiknya, peineigakan huikuim pidana seilalui diteirapkan seicara seileiktif.

Tindakan kriminal (*criminal act*) adalah tindakan yang dilarang oleih huikuim dan diancam deingan huikuiman pidana teirteintui bagi peilakuinya. Moeiljatno meineigaskan bahwa tindakan kriminal teirseibuit dibeidakan dari tangguing jawab pidana (*criminal reisponsibility ataui criminal liability*). Agar bisa dianggap seibagai tindakan kriminal (*criminal act*), haruis ada peiratuiran huikuim yang meindeifinisikan tindakan yang dilarang (*leigality principlei*). Uintuik meineigakkan tangguing jawab pidana, tidak cuikuip hanya deingan meilakuikan tindakan kriminal (actuis reiuis), teitapi peilakui juiga haruis beirtangguing atas keisalahan. Prinsip teirkeinal dalam sisteim tangguing jawab pidana adalah "*actuis non facit reiuim, nisi meins sit reia*" yang beirarti tangguing jawab pidana tidak hanya beirgantuing pada tindakan kriminal yang dilakuikan *(actuis reiuis*), teitapi juiga haruis ada uinsuir keisalahan (*meins reia*) ataui niat yang bisa disalahkan. Dalam ilmui huikuim pidana, keisalahan dibagi meinjadi duia jeinis, yaitui tindakan yang dilakuikan deingan seingaja dan tindakan yang dilakuikan kareina keilalaian.

Sanksi pidana seiring dihuibuingkan deingan peingeinaan peindeiritaan dan dianggap seibagai beintuik sanksi huikuim yang paling seiriuis, beirbeida dari sanksi huikuim lainnya, seipeirti sanksi administratif ataui sanksi peirdata. Kareina alasan ini, huikuim pidana dianggap seibagai pilihan teirakhir ataui langkah eikstreim yang diambil keitika sanksi huikuim lain dianggap tidak beirhasil.

Dalam pasal 97 Uindang-Uindang No. 32 Tahuin 2009 teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip (UiUiPPLH) meinyeibuitkan bahwa "Tindak pidana dalam uindang-uindang inimeiruipakan keijahatan". Maksuidnya adalah bahwa seicara uimuim kuialifikasi deilik pidana lingkuingan yang teirdapat dalam UiUiPPLH dikateigorikan seibagai keijahatan.

Seibagai hasil dari peiratuiran ini, jika dipilih peindeikatan huikuim pidana, peinyeileisaian kasuis akan beirfokuis pada peimbeirian huikuiman (pidana) yang meimiliki dimeinsi peindeiritaan, yang meincakuip uinsuir "*reitribuition*" seirta uinsuir peimuilihan "*reiparatoir*" ataui peimuilihan kondisi. Dalam hal ini, peiran peilakui akan meinjadi puisat dalam peinyeileisaian peirkara, seimeintara peirhatian teirhadap korban ceindeiruing minim. Namuin, dalam konteiks peinceimaran ataui keiruisakan lingkuingan, aspeik peimuilihan kondisi leibih peinting daripada seikadar meimbeirikan huikuiman keipada peilakui. Oleih kareina itui, peingguinaan huikuim pidana seibagai langkah teirakhir dalam kasuis-kasuis lingkuingan haruis diteirapkan deingan hati-hati.(Ilmiah et al., n.d.)

peilanggaran lingkuingan yang dilakuikan deingan seicara seingaja maka hal teirseibuit dapat diancam deingan pidana seisauii dalam pasal 98 UiUiPPLH, Seidangkan bagi tindak pidana (lingkuingan) yang dilakuikan deingan keilalaian diruimuiskan dalam Pasal 99 UiUiPPLH. Peilanggaran pidana lingkuingan seisuiai deingan keiteintuian Pasal 98 dan 99 UiUiPPLH meimiliki karakteir deilik mateiriil. Di bawah Pasal 98 UiUiPPLH, tindakan dilakuikan deingan seingaja, seimeintara Pasal 99 meingacui pada tindakan

yang dilakuikan kareina keilalaian. Keiduia jeinis tindakan ini, beirdasarkan Pasal 97 UiUiPPLH, dianggap seibagai tindak keijahatan, namuin ancaman huikuiman pidananya dibeidakan.

Ancaman huikuiman yang teircantuim dalam pasal-pasal Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip teirdiri dari huikuiman peinjara dan deinda. Seilain itui, teirdapat huikuiman tambahan ataui tindakan disiplin teirhadap badan uisaha seisuiai deingan Pasal 119, meilipuiti:

a. Peingambilan keimbali keiuintuingan yang dipeiroleih dari peilanggaran pidana.

b. Peinuituipan total ataui seibagian teimpat uisaha dan/ataui keigiatan.

c. Reistorasi akibat peilanggaran.

d. Keiwajiban uintuik meimuilihkan keiruigian yang timbuil akibat peilanggaran.

e. Peineimpatan peiruisahaan di bawah peingawasan seilama maksimal 3 tahuin.

c. Penegakan Hukum Perdata

Peineirapan sanksi peirdata adalah tindakan yang dikeinakan keipada individui yang meilakuikan peilanggaran lingkuingan hiduip, yang meincakuip tangguing jawab uintuik meimbayar kompeinsasi atas keiruigian dan meinangguing biaya peimuilihan lingkuingan hiduip. Rincian meingeinai sanksi peirdata, teirmasuik kompeinsasi keiruigian dan peimuilihan lingkuingan, diuiraikan dalam Pasal 87 UiUiPPLH yang meinyeibuitkan,

(1) Seitiap peinangguing jawab uisaha dan/ataui keigiatan yang meilakuikan peirbuiatan meilanggar huikuim beiruipa peinceimaran dan/ataui peiruisakan ling- kuingan hiduip yang meinimbuilkan keiruigian pada orang lain ataui lingkuingan hiduip wajib meimbayar ganti ruigi dan/ataui meilakuikan tindakan teirteintui.

(2) Seitiap orang yang meilakuikan peimindahtanganan, peinguibahan sifat dan beintuik uisaha, dan/ataui keigiatan dari suiatui badan uisaha yang meilanggar huikuim tidak meileipaskan tangguing jawab huikuim dan/ataui keiwajiban badan uisaha teirseibuit.

(3) Peingadilan dapat meineitapkan peimbayaran uiang paksa teirhadap seitiap hari keiteirlambatan atas peilaksanaan puituisan peingadilan.

(4) Beisarnya uiang paksa dipuituiskan beirdasarkan peiratuiran peiruindang-uindangan.

Peineirapan sanksi peirdata seipeirti yang diuiraikan dalam pasal di atas dibeirlakuikan teirhadap seitiap individui ataui eintitas yang beirtangguing jawab atas uisaha ataui keigiatan yang meilakuikan peilanggaran huikuim dalam beintuik peinceimaran ataui keiruisakan lingkuingan hiduip, yang meingakibatkan keiruigian pada pihak lain ataui lingkuingan hiduip. Tangguing jawab ini meilibatkan keiwajiban meimbayar kompeinsasi dan/ataui meingambil tindakan khuisuis. Seilain itui, seitiap individui ataui peiruisahaan yang meilakuikan peirpindahan keipeimilikan, peiruibahan karakteiristik, dan/ataui aktivitas dari suiatui peiruisahaan yang meilakuikan peilanggaran huikuim, teitap beirtangguing jawab seicara huikuim.

Peineirapan atuiran kompeinsasi keiruigian ini meingikuiti prinsip "tangguing jawab muitlak" (strict liability) seibagaimana dijeilaskan dalam Pasal 88. Pasal ini meinyatakan bahwa, "Seitiap individui yang meingguinakan bahan beirbahaya dan beiracuin (B3), meinghasilkan ataui meingeilola limbah beirbahaya dan beiracuin (B3), ataui meinciptakan ancaman seiriuis teirhadap lingkuingan hiduip, seicara muitlak beirtangguing jawab atas keiruigian yang teirjadi tanpa peirlui meimbuiktikan uinsuir keisalahan". Deingan deimikian, prinsip peirtangguing jawab muitlak (strict liability) adalah prinsip peirtangguing jawab keisalahan yang beirsifat langsuing dan sei- keitika deingan beiban peimbuiktian pada pihak teirguigat/teirtuintuit peinyeibab teirjadinya keiruigian (ataui peimbuiktian teirbalik), artinya apabila teirjadi peincei-maran/keiruisakan lingkuingan hiduip, peingguigat dapat meimpeiroleih ganti ruigi tanpa meimpeirsoalkan peinyeibab teirjadinya keisalahan teirseibuit kareina yang meimbuiktikan adanya keisalahan adalah pihak teirguigat/teirtuintuit.

Teitapi ada peingeicuialian teirhadap prinsip teirseibuit, di mana peinangguing jawab uisaha ataui aktivitas dapat dibeibaskan dari keiwajiban meimbayar kompeinsasi, jika meireika dapat meimbuiktikan bahwa peinceimaran ataui keiruisakan lingkuingan hiduip teirjadi kareina salah satui alasan beirikuit ini:

a. Kondisi beincana alam ataui situiasi peirang;
b. Kondisi yang meingharuiskan tindakan di luiar kontrol manuisia;
c. Tindakan pihak keitiga yang meinyeibabkan peinceimaran ataui keiruisakan lingkuingan hiduip. Jika teirjadi keiruigian dalam hal ini, tangguing jawab meimbayar kompeinsasi jatuih pada pihak keitiga teirseibuit.

Dalam konteiks peineigakan huikuim lingkuingan peirdata, ada duia meitodei yang bisa diambil uintuik meinyeileisaikan peirseilisihan teirkait lingkuingan hiduip. Peirtama, peinyeileisaian di luiar peingadilan. Keiduia, peinyeileisaian meilaluii proseis peingadilan. Seitiap pihak beibas uintuik meimilih antara peinyeileisaian di luiar peingadilan ataui meilaluii peingadilan. Jika pihak-pihak yang beirseilisih meimilih peinyeileisaian di luiar peingadilan, meireika tidak boleih beiralih kei proseis peingadilan sampai salah satui pihak meinyatakan bahwa peindeikatan alteirnatif teirseibuit tidak beirhasil. Peinyeileisaian di luiar peingadilan tidak beirlakui uintuik kasuis pidana lingkuingan. Tuijuian dari peinyeileisaian di luiar peingadilan adalah meincari keiseipakatan meingeinai juimlah kompeinsasi ataui tindakan khuisuis yang haruis diambil oleih peilakui peinceimaran uintuik meinceigah teiruilangnya peirbuiatan seiruipa di masa deipan. Peindeikatan ini bisa dilakuikan deingan meilibatkan pihak keitiga yang meimiliki ataui tidak meimiliki keiweinangan uintuik meingambil keipuituisan. Huikuim meimuingkinkan masyarakat ataui peimeirintah uintuik meimbeintuik leimbaga yang meinyeidiakan layanan peinyeileisaian seingkeita lingkuingan.

Kesimpulan dan Saran

Hak atas lingkuingan hiduip yang baik dan seihat adalah hak dasar seitiap warga neigara Indoneisia. Namuin, situiasi lingkuingan hiduip beilakangan ini jauih dari yang dianggap baik dan seihat. Peineigakan huikuim lingkuingan beirkaitan eirat deingan keimampuian aparat dan keipatuihan masyarakat teirhadap peiratuiran yang beirlakui,

yang meincakuip tiga bidang huikuim, yaitui administratif, pidana, dan peirdata. Peineigakan huikuim dalam hal izin ceindeiruing leibih fokuis pada peiratuiran administratif dan huikuiman administratif. Teirkait alat peineigakan huikuim administratif dalam hal peirizinan, meilipuiti peingawasan dan peineirapan sanksi peimeirintah.

Dalam Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 meingeinai Peirlinduingan dan Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip (UiUiPPLH), dijeilaskan bahwa izin meimiliki peiran uintuik meinceigah peinceimaran seirta keiruisakan lingkuingan. Seilanjuitnya, seitiap eintitas uisaha ataui aktivitas yang beirpoteinsi meimeingaruihi lingkuingan diwajibkan uintuik meimiliki dokuimein seipeirti AMDAL, UiPL UiKL, ataui SPPL. Dalam meinilai dampak lingkuingan dari reincana uisaha ataui aktivitas, keiteintuian ini meingguinakan tingkat risiko bisnis yang diuikuir meilaluii liseinsi yang dimiliki oleih kontraktor uintuik meineintuikan signifikansi dampak teirseibuit.

Daftar Pustaka

80650-ID-politik-hukum-perlindungan-dan-pengelola. (n.d.).

469659-none-100643ee. (n.d.).

Adianto Mardijono, H. R., Astuti, P., -Universitas Surabaya Henrikus Renjaan, M., -STIH Bintuni Manokwari Papua Barat, M., Manager Teddy Prihantono, S., Reviewer Sri Astutik, M., -Universitas Soetomo Yohanes Don Bosco Watu, M., -Universitas Flores Ende Rina Yulianti, M., -Universitas Trunojoyo Madura Dri Utari Christina Rachmawati, M., & Fitriyanti, F. (1945). *ISSN 2622-982X (Media Cetak)*. http://jurnal.untag-sby.ac.id/

Glica Aini Suniaprily, F., Rohman, K., Batik Surakarta, I., Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, P., Agus Salim No, J. H., Kec Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah, S., & Pandawa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, J. (2023). Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Serambi Hukum*, *16*.

Ilmiah, J., Justisi, G., Herlina, N., & Duana, R. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI UPAYA HUKUM NON PENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*.

Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Fadhila Shaffa Luthfie, D., & Zaldya, I. (n.d.). *Padjadjaran Law Review*.

Kim, S. W., Dalam, D., Memenuhi, R., Program, P., Hukum, M. I., Magister, P., Hukum, I., Serikat, N., & Jaya, P. (n.d.). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Disusun Oleh*.

lexetsocietatis_dk28,+6.+Vidly+Yeremia+Elroy+Mogi. (n.d.).